

No.38, Februari 2008

ISSN 1410-895X

ARAH REFORMASI INDONESIA

Sejarah dan Pendidikan

**SPOKEN AND SILENT WITNESS:
REPRESENTATIONS
OF THE 1965 TRAGEDY
IN INDONESIAN COLLECTIVE MEMORY**

YOSEPH YAPI TAUM

SEJARAH BERBASIS KONTINUITAS

H. PURWANTA

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
BERBASIS KOMPETENSI:
SUATU ANALISIS DESKRIPTIF**

DARSITI



LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATADHARMA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
1. SPOKEN AND SILENT WITNESS: REPRESENTATIONS OF THE 1965 TRAGEDY IN INDONESIAN COLLECTIVE MEMORY	1
Abstract	1
1.1 Introduction	2
1.2 A Glimpse into History: PKI and the 1965 Tragedy	3
1.3 Anticommunist Campaign as a Cornerstone of the New Order	5
1.4 Making and Evoking Memory	8
1.5 Against the Amnesia: The Role of Indonesian Writers	12
1.6 Concluding Remarks	17
Bibliography	19
Footnotes	23
2. SEJARAH BERBASIS KONTINUITAS	27
2.1 Pengantar	27
2.2 Dominasi Wacana Perubahan	29
2.3 Sejarah Berbasis Kontinuitas	33
2.4 Penutup	40
Catatan Kaki	41
3. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BERBASIS KOMPETENSI: SUATU ANALISIS DESKRIPTIF	43
3.1 Pendahuluan	43
3.2 Identifikasi Masalah	45
3.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	47
3.4 Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi	47

SEJARAH BERBASIS KONTINUITAS

H. Purwanta

2.1 Pengantar

Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakan oleh manusia yang terikat ruang dan waktu untuk memenuhi idealisme tertentu, termasuk di dalamnya ilmu sejarah. Dari sudut pandang ini, masyarakat manusia menciptakan ilmu sejarah tentu mempunyai maksud. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah maksud apakah yang ada di benak masyarakat saat mencipta ilmu sejarah?

Secara akademis dipahami bahwa sejarah bertugas menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lampau subjektif mungkin atau mendekati realitas objektif dari peristiwa yang dijelaskan. Mungkinkah? Apabila kedekatan dengan realitas objektif sebagai tujuan, maka sejarah akan selalu gagal dalam menunaikan tugasnya. Setiap peristiwa terjadi dalam waktu tertentu dan kemudian hilang. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin melakukan perbandingan antara eksplanasi sejarah dengan peristiwa sejarah untuk mengukur tingkat objektivitasnya.¹

Selain ketidakmampuan menghadirkan kembali peristiwa sejarah, permasalahan lain adalah panjangnya jarak antara peristiwa dengan eksplanasi sejarah. Ketika suatu peristiwa sejarah disusun menjadi reportase oleh pembuat berita (baca: penyusun sumber sejarah) terbuka ruang yang sangat lebar untuk terjadinya distorsi, deviasi, dan bahkan mungkin destruksi makna. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kehidupan dan kepentingan antara penyusun sumber sejarah dengan pelaku sejarah. Dari sudut pandang ini, sumber sejarah lebih merupakan hasil pembacaan subjektif pembuat berita

terhadap realitas objektif. Dengan kata lain, sumber sejarah tidak lagi dapat ditempatkan semata-mata mencitrakan realitas objektif suatu peristiwa sejarah, tetapi sudah seharusnya ditempatkan sebagai hasil pemaknaan atau wacana dari pembuat sumber sejarah.

Saat sumber sejarah menjadi teks yang otonom ditemukan dan dibaca oleh para arkheolog atau sejarawan, maka pemaknaan dan proses produksi wacana kembali terulang. Seiring dengan itu, distorsi, deviasi dan bahkan mungkin destruksi makna juga sangat terbuka untuk terjadi lagi dan kali ini pelakunya adalah arkheolog atau sejarawan yang tentu saja memiliki latar kehidupan dan kepentingan berbeda dengan pembuat sumber. Dari sudut pandang ini, eksplanasi sejarah yang terkandung pada historiografi juga tidak dapat ditempatkan sebagai representasi dari realitas objektif, tetapi lebih sebagai wacana yang diproduksi oleh sejarawan sesuai dengan idealismenya dan kaidah-kaidah yang telah disepakati.

Wacana yang terkandung dalam eksplanasi sejarah itu pulalah yang dari awal masa reformasi sampai sekarang hangat dibicarakan orang. Bahkan kemudian melahirkan pandangan bahwa telah terjadi penggelapan sejarah dan pada tingkat selanjutnya memunculkan tuntutan untuk dilakukannya pelurusan sejarah.² Terlepas dari kuat tidaknya argumen yang dinarasikan untuk mengkritik wacana dalam karya sejarah masa Orde Baru, berbagai kalangan sejarawan tidak setuju dengan penggunaan kata penggelapan dan pelurusan. Istilah pelurusan akan memberi kesan dan pesan kepada pembaca tentang adanya sejarah yang bengkak (gelap) dan sekaligus mengklaim bahwa eksplanasi sejarahnya adalah paling benar.

Kesadaran akan terdapatnya tumpukan wacana pada eksplanasi sejarah melahirkan pemahaman bahwa klaim sebagai paling benar merupakan sesuatu yang tabu dalam ilmu sejarah. Disadari sepenuhnya bahwa kebenaran yang disampaikan melalui tulisan sejarah adalah bukan kebenaran final yang dapat ditulis dengan "K" huruf kapital. Sebaliknya, kebenaran yang terdapat pada eksplanasi sejarah merupakan kebenaran dengan huruf "k" kecil, yang tidak lain merupakan wacana yang diproduksi oleh sejarawan sesuai dengan kaidah akademik yang telah disepakati, sehingga setiap saat terbuka untuk diperbaiki, disempurnakan atau bahkan diganti.

"... sejarah selalu bisa ditulis ulang. Jangan menggunakan istilah 'pelurusan sejarah'. Saya selalu menggunakan istilah 'penulisan ulang sejarah', karena itu adalah hal yang wajar. Misalnya, kalau ada fakta baru, kenapa tidak, ya *kan*. Coba lihat sekarang, banyak sekali buku yang beredar di pasar," jelasnya³

2.2 Dominasi Wacana Perubahan

Salah satu wacana yang kuat dinarasikan selama Orde Baru adalah perubahan. Melalui pembangunan yang dijadikan ikon pada saat itu, pemerintah berusaha untuk mengubah masyarakat Indonesia dari agraris menjadi industri. Kiranya belum terhapus dari ingatan kolektif kita, betapa bangganya ketika kelas tertentu dari masyarakat kita menyanggah gelar sebagai agen perubahan atau *agent of social change*.

Historiografi Indonesia sebagai produk anak zaman, tentu saja tidak dapat lepas dari dominasi wacana perubahan. Hal itu tampak dari berbagai narasi sejarah yang dihasilkan selama Orde Baru. Beberapa unsur yang secara kuat dinarasikan oleh sejarawan antara lain sebagai berikut.

2.2.1 Konstanta dan Variabel

Salah satu wacana yang kuat dinarasikan selama Orde Baru adalah perubahan. Melalui pembangunan yang dijadikan ikon pada saat itu, pemerintah berusaha untuk mengubah masyarakat Indonesia dari agraris menjadi industri. Kiranya belum terhapus dari ingatan kolektif kita, betapa bangganya ketika kelas tertentu dari masyarakat kita menyanggah gelar sebagai agen perubahan atau *agent of social change* sebagai berikut.

Historiografi Indonesia sebagai produk anak zaman, tentu saja tidak dapat lepas dari dominasi wacana perubahan. Hal itu tampak dari berbagai narasi sejarah yang dihasilkan selama Orde Baru. Salah satu unsur terpenting pada historiografi Indonesia periode Orde Baru adalah eksplanasi sejarah masyarakat Indonesia yang lebih banyak ditampilkan dalam wacana ketergantungan terhadap berbagai kekuatan di luar masyarakat Indonesia, seperti kebudayaan India, Arab, dan Barat.⁵ Penempatan kekuatan luar sebagai konstanta dan masyarakat

Indonesia sebagai variabel tergantung, menjadikan eksplanasi sejarah didominasi oleh wacana yang menarasikan bahwa kehidupan masyarakat dalam alur keharusan berubah.⁶

Untuk mendukung wacana yang disampaikan, sebagai gambaran, sejarawan menarasikan bangsa India yang agraris sebagai pelaut ulung. Mereka berhasil mengarungi samudera untuk mengubah bangsa maritim Nusantara yang saat itu tak jelas aktivitasnya. Bahkan tidak segan-segan Hindu yang merupakan tradisi atau adat istiadat India oleh sejarawan ditampilkan sebagai agama dakwah yang siap melakukan pasifikasi kultural dengan didukung kaum Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Eksplanasi sejarah untuk periode itu mewacanakan dengan kuat bahwa kebudayaan India datang dan menjadikan masyarakat Nusantara berubah menjadi beragama Hindu. Wacana yang sama juga diproduksi untuk ekspalanasi sejarah periode berikutnya. Ketika pedagang Arab datang, masyarakat Indonesia berubah menjadi Islam, dan ketika Barat datang masyarakat pun harus berubah menjadi kuli dan Kristen.

Dengan menempatkan masyarakat Indonesia sebagai obyek penyebaran kebudayaan luar, disadari ataupun tidak, sejarawan dan guru sejarah telah menginfuskan wacana ke benak masyarakat luas bahwa kebudayaan India, Arab, dan Barat sebagai kekuatan pengubah masyarakat Indonesia. Tanpa kehadiran kebudayaan luar, masyarakat Indonesia adalah bukan siapa-siapa dan tak berarti apa pun (*nobody and nothing*).

2.2.2 Sindrom Rendah Diri

Akibat “pengarahan opini publik” yang dilakukan melalui eksplanasi sejarah, terutama oleh sejarawan akademis sebagai pemilik otoritas terhadap pengolahan masa lampau, masyarakat Indonesia sebagai pembaca historiografi secara pelan tetapi pasti memiliki sindrom rendah diri. Masyarakat merasa tak diberi warisan satu hal pun yang positif atau berharga oleh leluhur mereka. Setiap membaca sejarah, yang ditemui hanyalah kebiadaban, kebodohan, kemiskinan, dan kekolotan nenek moyang. Sebaliknya, kekuatan luar selalu dipandang sebagai pembawa pencerahan yang pada kadar tertentu mampu memajukan masyarakat Indonesia. Kekuatan yang “memaksa”

masyarakat Indonesia mengubah sesuai dengan “kehendak” kekuatan luar tersebut. Sebagai contoh, banyak ditemukan bangunan candi diwacanakan sebagai berubah masyarakat Indonesia menjadi Hindu. Pandangan itu menjadikan dalam darah pembaca sejarah mengalir “kebenaran” bahwa masyarakat Indonesia memang sungguh lebih rendah kebudayaannya apabila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa India.

Posisi paling tinggi masyarakat Indonesia seakan hanya sebagai peniru yang kreatif kalau bukan *copycat*. Sindrom rendah diri itu semakin membesar ketika dinyatakan bahwa pembuatan patung raja yang ditempatkan di dalam candi sebagai perwujudan konsep dewa raja. Melalui wacana yang diproduksi para sejarawan, masyarakat Indonesia belajar bahwa leluhur mereka selain berposisi peniru juga memiliki sifat otoriter (sewenang-wenang). Hal yang sama juga terjadi ketika serangan Mataram ke Jawa Timur diwacanakan sebagai manifestasi usaha penciptaan hegemoni. Analisis Mataram semata-mata sebagai kerajaan yang haus kekuasaan, akan berdampak pada ketidakbersediaan masyarakat Yogyakarta sebagai pembaca historiografi untuk menempatkan raja-raja Mataram sebagai pemimpin yang pantas dihormati dan menempati sudut ingatan kolektif mereka.

2.2.3 Sejarah Tanpa Masyarakat dan Masyarakat Tanpa Sejarah

Selain sindrom rendah diri, penempatan Indonesia pada posisi selalu tergantung terhadap pengaruh asing, juga menjadikan masyarakat cenderung menolak eksplanasi sejarah sebagai masa lampau mereka. Masyarakat memahami bahwa eksplanasi sejarah selalu “bukan tentang kami”. Sejarah hanya menceritakan tentang kiprah kekuatan luar atau “mereka” di Indonesia. Sindiran bahwa historiografi Indonesia merupakan sejarah tanpa masyarakat kiranya cukup tepat untuk menggambarkan relasi eksplanasi sejarah dengan masyarakat sebagai pembacanya.⁷ Buku-buku sejarah tidak diminati dan pendidikan sejarah sebagai mata pelajaran yang membosankan. Dari sudut pandang ini, peminggiran sejarah yang dilakukan masyarakat menjadi dapat dimaknai sebagai langkah pencegahan terhadap berlarutnya kerusakan.

Penolakan masyarakat tentu tidak mungkin disuarakan, karena mereka tak lagi mampu bersuara. Mereka secara perlahan telah kehilangan keterampilan dan sistem reproduksi masa lampau, terutama sejak seminar sejarah nasional pertama di Yogyakarta pada tahun 1957 yang mewacanakan pentingnya metode sejarah dalam sistem produksi historiografi Indonesia.⁸ Hanya sejarawan akademik yang memiliki otoritas untuk menyuarakan wacananya melalui rekonstruksi masa lampau.

Selain diam-diam menolak wacana yang diproduksi oleh sejarah, masyarakat juga merasa tidak memiliki banyak manfaat dari belajar sejarah yang diproduksi oleh sejarawan akademik. Meski oleh guru sejarah dan para sejarawan dipropagandakan pentingnya kesadaran sejarah, masyarakat mengalurkan hidup mereka tanpa berlandas sejarah. Masyarakat meninggalkan sejarah dan hidup tanpa sejarah.

2.2.4 Indonesia Trendy

Wacana perubahan yang dinarasikan oleh historiografi menjadikan masyarakat tidak memiliki apa pun dari masa lampau yang dapat dijadikan pegangan hidup ketika zaman global didatangkan. Pada pertengahan dasa warsa sembilan puluhan Presiden Soeharto sebagai pemimpin Indonesia saat itu menyatakan “mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap kita tidak bisa menghindari dari arus besar globalisasi”.⁹ Pernyataan itu mengindikasikan akan ketidakberdayaan masyarakat Indonesia untuk mengambil sikap tertentu sebagai makhluk yang otonom dan rasional. Seakan satu-satunya kemungkinan hanyalah pasrah kemana pun pusran global akan membawa. Apabila arus global menjadikan jilbab sebagai ikon kebangkitan Islam, maka masyarakat pun suka tidak suka harus menerimanya. Sebaliknya, apabila pakaian model tank top menjadi simbol kebebasan kaum perempuan, mau tidak mau mereka juga harus menerimanya. Oleh karena itu, tidak perlu heran apabila kemudian jilbab dipadukan dengan pakaian ketat ala tank top oleh generasi muda Indonesia.

Bangsa Indonesia telah menjelma menjadi masyarakat trendy, yaitu mengikuti apa pun yang terjadi untuk tidak dikatakan sebagai ketinggalan zaman. Ketrendian pun tampak dari generasi muda

Indonesia yang tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan tanah tumpah darahnya dan sangat siap menjadi warga global:

Ask young Indonesians today what makes them Indonesians, and the answer may likely surprise, or disappoint you.

“I’m Indonesian because I was born in Indonesia and I’m a citizen of Indonesia, I just have to live with that,” Intan Nirwani, a 14-year-old high school student, said when she was asked about what it meant being an Indonesian.

Swastika, 24, an anchor at a TV station and also Javanese, gave a similar answer.

“It’s just a statistical status. I mean...you are Indonesian because your ID and your passport say so,” Swastika stated.

It may be a false assumption to say that Intan and Swastika represent the general feeling of Indonesia’s younger generation about their country, but their answers reflect a growing trend among the younger generation. They seem to have grown further away from the sense of being Indonesian that was still very much alive among the previous generations.

For many of today’s young people, being Indonesian means nothing more than a “geographical fact” — because they were born and raised in the country. Nothing more, nothing less.

Ramadhani, 22, a high school dropout and a street beggar, and Ismail, 17, a student at the Santi Rama school for the disabled, said they were Indonesians only because they lived here.¹⁰

2.3 Sejarah Berbasis Kontinuitas

Generasi yang rendah diri, yang hidup tanpa masa lalu dan *trendy* itukah yang hendak dibentuk oleh sejarawan? Tentu saja tidak. Tak seorang sejarawan pun menghendaki generasi baru Indonesia hidup tanpa identitas. Sebaliknya, sejarawan menghendaki lahirnya generasi baru Indonesia yang memiliki identitas kokoh, nasionalis, dan humanis. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara untuk memproduksi eksplanasi sejarah yang mampu mengantarkan ke tujuan tersebut? Adalah menjadi tugas semua orang yang berkecimpung dalam dunia sejarah untuk mencari terobosan dan menemukan wacana eksplanasi sejarah yang pas untuk bangsa

Indonesia. Eksplanasi yang mampu menjadikan sejarah sebagai *house of solution for contemporary Indonesian problems*. Salah satu model eksplanasi sejarah yang ditawarkan melalui tulisan ini adalah Sejarah Berbasis Kontinuitas.

2.3.1 Fungsi Sejarah

Pada semua komunitas, eksplanasi sejarah secara turun-temurun difungsikan sebagai media pewaris identitas. Melalui eksplanasi sejarah yang dilakukan, masyarakat mengharapkan generasi baru menjadi memahami siapa diri mereka dan ke mana hidup harus diarahkan, meyakini berbagai keutamaan yang dijadikan landasan untuk mengarungi dan memaknai kehidupan masa kini dan mendatang.

Salah satu contoh bagaimana masyarakat menghidupi identitasnya, dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Wotgaleh, Yogyakarta. Mereka mengidentifikasi diri sebagai masyarakat pemberani yang tak mengenal rasa takut untuk membela kebenaran yang diyakini. Oleh masyarakat sekitar, masyarakat Wotgaleh diidentifikasi sebagai tukang berkelahi. Identitas Wotgaleh tersebut berakar dari keyakinan bahwa mereka merupakan pengikut setia Pangeran Purboyo, panglima perang sakti kerajaan Mataram dan pemilik perdikan Wotgaleh, yang tidak pernah mengenal rasa takut.

Untuk menghidupi identitas kolektifnya, masyarakat Wotgaleh membuat eksplanasi sejarah tentang kehebatan Pangeran Purboyo yang disampaikan kepada generasi muda melalui pertemuan rutin di Masjid Sulthoni. Identitas tersebut sampai sekarang tetap dihidupi, sehingga generasi baru mereka mewarisi sikap pantang menyerah untuk meminta kembalinya kampung Wotgaleh yang telah menjadi milik Bandara Adisucipto.

Hal yang sama juga dilakukan oleh bangsa Eropa ketika membuat eksplanasi sejarahnya:

Why all the emphasis on the Greeks? It is because the Greeks were the first people in ancient times who thought and acted much like us. They displayed a keen intellectual curiosity, which led to speculation on almost every subject. They also had a strong individualistic spirit, and would not accept any law, rule or fact just because somebody.¹¹

Salah satu sifat identitas kolektif adalah unik, sehingga model eksplanasi sejarah pun bersifat unik. Masyarakat yang menempatkan individualisme, rasionalisme, dan empirisme sebagai keutamaan akan memiliki model eksplanasi sejarah yang berbeda dengan masyarakat yang menempatkan kekerabatan dan keselarasan sebagai keutamaan. Perbedaan model eksplanasi juga dapat disimak pada masyarakat tulis dan masyarakat lisan. Pada masyarakat berbudaya tulis, orang cenderung lebih mempercayai eksplanasi dan sumber yang berbentuk tulisan dari pada lisan. Sebagai gambaran adalah perkembangan ilmu sejarah. Pencarian sumber primer tertulis, seperti dokumen, catatan harian dan sebagainya, menjadi bagian yang sangat penting dalam ilmu sejarah. Tersendatnya perkembangan sejarah lisan di lain pihak merupakan manifestasi dari kurangpercayaan terhadap sumber lisan.¹²

Sebaliknya, pada masyarakat berbudaya lisan, orang lebih mempercayai ucapan lisan dari pada tulisan. Indonesia yang pada awalnya sebagai masyarakat yang berbudaya lisan, secara turun-temurun melakukan eksplanasi sejarah secara lisan. Masyarakat dengan tekun mendengarkan tetua yang mengkisahkan riwayat cikal bakal kampung mereka saat dilakukan upacara ruwahan. Bagi anggota masyarakat yang segenerasi atau satu dua tingkat di bawah cikal bakal akan dapat secara lebih detil mengingat berbagai peristiwa yang dikisahkan oleh tetua kampung. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian sejumlah generasi, ingatan akan peristiwa detil menipis dan tergantikan oleh ingatan tentang peristiwa secara global dan akhirnya yang tertinggal adalah ingatan tentang nilai dari sebuah peristiwa yang dikisahkan. Pada tahap ini, fenomena historis yang dijelaskan sangat mungkin berubah bentuk menjadi cerita rakyat atau legenda yang tidak jarang dibumbui dengan proses mistifikasi.

Meskipun terdapat perbedaan model eksplanasi sejarah antar-kebudayaan, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewariskan identitas kultural. Dari perspektif ini, eksplanasi sejarah akan dipandang baik oleh masyarakat apabila mampu menjadi media pewarisan identitas kolektif mereka. Eksplanasi sejarah yang mampu menjadikan generasi baru bangga terhadap kebudayaan dan menjadi bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Bagaimana kalau eksplanasi sejarah tidak memenuhi fungsi untuk mewariskan identitas kultural atau bahkan mendestruksinya? Dapat diprediksi akibatnya, yaitu lahirnya generasi baru yang tidak memiliki identitas kultural. Sartono menjelaskan:

Tanpa identitas, sukar bahkan mustahil melakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya. Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbullah pada dirinya kecacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus menerus.¹³

Selain memiliki fungsi sebagai pewaris identitas kultural, eksplanasi sejarah juga memiliki fungsi untuk menjaga kohesivitas sosial kontemporer. Dalam rangka mencapai cita-cita kolektif, masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, baik berupa persaingan, konflik maupun perang, yang tidak jarang mengancam kepaduan kehidupan mereka sebagai komunitas. Untuk memperoleh solusi yang tepat, masyarakat akan bertanya kepada sejarah. Dalam konteks ini, eksplanasi sejarah sudah seharusnya mampu menyumbang solusi terhadap problem aktual yang sedang dihadapi. Sejarah dikodratkan menjadi basis data yang berupa kumpulan solusi semua permasalahan hidup manusia. Oleh karena itu, melalui koleksinya sejarah memiliki tanggungjawab untuk memberikan eksplanasi berbagai peristiwa masa lampau yang memiliki relevansi tinggi terhadap problem aktual, sehingga masyarakat mampu mengambil langkah yang tepat dalam usaha mengembalikan kohesivitas sosialnya.

Salah satu usaha untuk menjadikan eksplanasi sejarah sebagai sumber solusi bagi problem aktual masyarakat adalah tulisan Sartono Kartodirdjo saat menanggapi gejolak masyarakat di Way Jepara, Talangsari, Lampung. Dengan membahas gerakan protes petani akhir abad XIX dan awal abad XX, dia berusaha menyatakan bahwa terdapat kemiripan pola dengan gerakan protes di Way Jepara.

Dipandang dengan perspektif sejarah, Peristiwa Lampung tidak merupakan kejutan sejarah karena dalam pola, struktur dan kecenderungan tidak banyak berbeda dengan peristiwa-peristiwa gerakan protes petani yang legio (massal) itu. Frekuensinya masa kini jauh berkurang dan dengan pengetahuan kita mengenai sifat dan hakekatnya yang lebih luas, kiranya relatif lebih gampang juga diketemukan pendekatan yang efektif dan bijaksana selaras dengan etos Bangsa Indonesia.¹⁴

Dengan demikian, sejarah memiliki tanggungjawab terhadap terjaganya kohesivitas sosial. Sejarah memiliki kewajiban ikut mendorong semua lapisan masyarakat untuk menjunjung tinggi berbagai kesepakatan publik yang telah dicapai berdasar hikmat kebijaksanaan. Melalui eksplanasi diakronisnya, sejarah memiliki kesempatan luas untuk meninjau secara kritis berbagai kesepakatan publik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kebanggaan rasional untuk mengikuti sistem yang berlaku.

Selain memenuhi fungsi kultural dan sosial, dewasa ini eksplanasi sejarah juga dituntut untuk dapat memenuhi kriteria-kriteria akademis, sehingga uraiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kriteria ini secara kuat diwacanakan sejak kebudayaan Eropa (pada masa kini juga dikenal sebagai kebudayaan Barat) mendominasi dunia dan berbagai aspeknya ditempatkan sebagai ukuran "kebenaran universal". Oleh karena kebudayaan Eropa antara lain menempatkan objektivitas, rasionalitas dan empirisme sebagai kriteria kebenaran, maka sejarah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan juga menempatkan ketiganya sebagai ukuran kebenaran (baca: kebaikan). Untuk mencapai sasaran ilmiahnya, yaitu penjelasan sejarah yang objektif, rasional dan didukung dengan bukti-bukti empiris, ilmu sejarah mengembangkan berbagai cara yang terangkum dalam metode dan metodologinya.

2.3.2 Sejarah Berbasis Kontinuitas sebagai Alternatif

Alternatif yang mungkin ditempuh untuk memproduksi eksplanasi sejarah yang mampu menjadi media pewarisan identitas kultural, menegakkan kohesivitas sosial dan sekaligus memenuhi kaidah keilmuan, adalah dengan mengembangkan sejarah berbasis kontinuitas. Secara tradisi, ilmu sejarah mengkaji dua aspek, yaitu

change dan *continuity*. Bagai dua sisi pada mata uang, kedua aspek itu seharusnya selalu ada pada setiap eksplanasi sejarah. Akan tetapi, oleh para *agent of social change* di Indonesia aspek kontinuitas hampir tidak pernah ternarasikan, untuk tidak mengatakan ditenggelamkan.

Sejarah Berbasis Kontinuitas justru menempatkan aspek kontinuitas sebagai jiwa dari eksplanasi sejarah. Salah satu alternatifnya adalah dengan menempatkan identitas kolektif sebagai unsur utama dari kontinuitas. Dengan kata lain, peristiwa sejarah dipahami sebagai tindakan simbolik masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan dengan berlandas identitas kolektifnya. Perubahan yang terdapat pada setiap kejadian sejarah ditempatkan dalam kerangka mempertahankan dan mengembangkan identitas kultural tersebut.

Bangunan candi yang banyak terdapat di Indonesia, akan lebih objektif dan bermakna apabila ditempatkan sebagai pengembangan bentuk penghormatan kepada orang tua atau yang dituakan dari pada dimaknai sebagai dominasi kebudayaan India di Indonesia. Hal itu sesuai dengan pengertian *cinandi* pada bahasa Jawa yang berarti pemuliaan. Penempatan patung raja dalam candi juga akan lebih masuk akal (*make sense*) apabila dimaknai sebagai manifestasi penghormatan kepada orang tua dari pada perwujudan konsep kekuasaan dewa-raja. Dengan demikian, penghormatan kepada orang tua yang sekarang "masih" dihidupi oleh masyarakat menjadi memperoleh peneguhan oleh eksplanasi sejarah. Peneguhan melalui eksplanasi sejarah sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan diri, sehingga masyarakat tidak ketakutan dan bahkan bangga menjalankan penghormatan orang tua yang sudah meninggal (baca: leluhur) meski dinegasikan sebagai musyrik atau bahkan kafir.

Sejajar dengan itu, serangan Mataram ke Jawa Timur akan menjadi lebih bermakna dan objektif bagi masyarakat Yogyakarta khususnya apabila dimaknai sebagai simbol perlawanan masyarakat pendukung kebudayaan Jawa terhadap tekanan kebudayaan Arab dari pada sekedar melakukan hegemoni politik. Pemaknaan itu mungkin dilakukan apabila sejarawan bersedia menempatkan serangan tersebut dalam satu kesatuan konteks tindakan simbolik Mataram untuk menghidupkan kembali kebudayaan Jawa pada peristiwa sejarah

lainnya, seperti pembangunan makam Imogiri, penciptaan penanggalan Jawa, penciptaan stratifikasi bahasa Jawa serta pengembangan kerajinan bergambar manusia dan hewan. Apalagi kalau Yogyakarta sebagai kota budaya saat ini juga dijadikan pertimbangan.

Eksplanasi sejarah yang mendasarkan diri pada kontinuitas akan mampu memberikan penjelasan benang merah keutamaan yang dihidupi masyarakat lampau, kini dan bahkan esok. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 akan *meaningless* apabila ditempatkan sebagai tonggak bagi muncul dan berkembangnya otoritarianisme pemerintahan Soekarno. Akan lebih manusiawi apabila tindakan Soekarno itu ditempatkan pada konteks identitas kulturalnya, yaitu usaha untuk mewujudkan gotong royong sebagai jiwa sistem politik Indonesia. Pemaknaan itu sesuai dengan alur pemikirannya, baik pada zaman pergerakan maupun pidatonya pada sidang BPUPKI. Sebaliknya, sifat anti perbedaan yang mewarnai pemerintahannya pada waktu-waktu berikutnya juga akan menjadi dapat dijelaskan secara proporsional dengan memperhitungkan dinamika politik, baik dalam negeri maupun internasional sebagai satu kesatuan konteks.

Aspek kontinuitas menjadikan eksplanasi sejarah mampu menjangkau penjelasan dinamika masyarakat Indonesia menurut perspektif Indonesia. Dengan kata lain, sejarah berbasis kontinuitas memungkinkan masa lampau dieksplorasi secara lebih otonom, karena tidak tergantung pada kekuatan luar. Masyarakat Indonesia menjadi konstanta dalam dinamika sejarahnya sendiri. Penempatan sebagai konstanta tidak sekali-kali mengakibatkan eksplanasi sejarah menjadi ultra nasionalis dan anti asing. Eksistensi pengaruh kekuatan asing tidak dapat dinafikan dalam sejarah Indonesia, tetapi menjadi berlebihan apabila ditempatkan sebagai determinan. Berbagai kajian antropologis memperlihatkan bahwa pengaruh kekuatan asing tidak pernah menjadikan masyarakat Indonesia pada masa lampau berubah menjadi masyarakat berbudaya asing.

Selain mengembangkan otonomi sejarah Indonesia, penggunaan kontinuitas identitas sosio-kultural Indonesia sebagai perspektif akan menjadikan wacana yang diproduksi melalui eksplanasi sejarah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat kontemporer. Masyarakat masa kini menjadi dapat memahami nilai-

nilai dari masa lampau yang harus ditempatkan sebagai keutamaan untuk mengarungi kehidupan di masa sekarang dan sekaligus memberi inspirasi bagi eksplorasi kreatif yang harus mereka lakukan untuk mengembangkan diri ke masa depan. Hanya melalui pemahaman akan identitas kulturalnya, masyarakat mampu mengembangkan diri dan memecahkan berbagai permasalahan kontemporer.

Sebagai bagian dari Fakultas Sastra, eksplanasi aspek kontinuitas dari masa lampau akan mampu memberikan sumbangan besar dalam pemaknaan semiotis terhadap berbagai fenomena aktual serta kajian teks sastra masa lampau. Sebaliknya, sejarah juga dapat memperoleh berbagai manfaat dari perkembangan hermeneutika dan semiotika yang terjadi di dunia kebahasaan. Bahkan sekat-sekat yang mengungkung ketiga program studi yang ada di Fakultas Sastra menjadi sangat mungkin dicairkan dengan melakukan kajian bersama dalam payung *cultural studies*.

2.4 Penutup

Ilmu sejarah secara kultural merupakan salah satu alat masyarakat untuk mewujudkan peri kehidupan yang dicitakan. Oleh karena itu, sudah selayaknya Ilmu Sejarah bertekun diri untuk menjadi alat masyarakat dalam membangun kehidupan sesuai dengan tata nilainya. Dengan kata lain Ilmu sejarah sudah seharusnya memenuhi fungsi utamanya, yaitu sebagai alat pewaris identitas kultural dan pembangun kohesivitas sosial masyarakat. Apabila dengan berbagai alasan justru menempatkan diri berseberangan, maka akan banyak masalah yang muncul. Selain masyarakat menolak historiografi yang dihasilkannya, eliminasi terhadap Ilmu Sejarah juga menjadi sangat mungkin terjadi.

Catatan Kaki

- ¹ Oleh karena kebenaran objektif tidak mungkin diperoleh, maka dalam ilmu sejarah berlaku pengukuran khusus, yaitu korespondensi atau dukungan sumber yang memadai dan koherensi atau keselarasan dengan kebenaran umum. Simak F.R. Ankersmit, 1987, *Refleksi Tentang Sejarah*. Terjemahan Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia, hlm.110-117.
- ² Protes ditujukan kepada eksplanasi sejarah resmi (official), terutama tentang Peristiwa 1965 atau Gestapu. Kritik antara lain tentang tidak tercantumnya kelompok korban, etnis minoritas dan aspek tertentu dalam sejarah nasional. Misalnya, Revrison Bawahir menyatakan bahwa sejarah tidak menjelaskan tentang kewajiban Indonesia membayar utang Belanda sebesar 6,3 juta gulden pada pasca KMB. Lihat Kompas 13 Agustus 2008.
- ³ Pikiran Rakyat, 2 Oktober 2003. Lihat juga wawancara Taufik Abdullah pada *Jakarta Post*, 22 Januari 2006.
- ⁴ *Agent* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penyalur. Apabila kelas tertentu berposisi sebagai agent, siapakah yang bertindak sebagai perancang atau engineer of social change?
- ⁵ Posisi Indonesia yang digambarkan sangat tergantung pada kekuatan luar dibahas secara mendalam oleh Bambang Purwanto dengan istilah determinisme. Lihat Bambang Purwanto, "Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis tentang Historiografi Indonesiasentris" pada *Humaniora* volume XIII No.1/2001, hlm.36.
- ⁶ Wacana seperti itu mengingatkan penulis pada pemikiran Foucault tentang madness, Indonesia oleh sejarawan ditempatkan sebagai orang gila dan asing sebagai obat mujarab yang mampu mengubahnya menjadi waras. Lihat Michael Foucault, 1972, *The archeology of knowledge*, Routledge terdapat pada <http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/foucaul2.htm> khususnya chapter 3.
- ⁷ Lihat Henk Schulte Nordholt, *De-colonising Indonesian Historiography*, Paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies public lecture series "Focus Asia", 25-27 May, 2004 at Lund University, Sweden.
- ⁸ Pembahasan tentang isi dari seminar tersebut telah banyak dilakukan. Isi pokoknya adalah perdebatan penulisan sejarah Indonesia antara kelompok Soedjatmoko yang menekankan pentingnya penggunaan metodologi secara ketat dengan kelompok Moh. Yamin yang menekankan mendesakny kebutuhan masyarakat akan pengembangan nasionalisme. Patut disayangkan apabila hasil akhirnya adalah bukan *win-win*, tetapi *win-lose* dengan korban di pihak pengembangan

nasionalisme. Perdebatan itu dengan menarik dibahas oleh Rommel Curaming, *Toward Reinventing Indonesian Nationalist Historiography* yang terdapat pada http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue2/article_245.html

⁹ Ungkapan sejenis berkali-kali disampaikan antara lain pada pidato pertanggungjawaban presiden kepada MPR tanggal 1 Maret 1998.

¹⁰ Jakarta Post, 16 Agustus 2003. Hal senada diungkapkan oleh Alfitra Salam, *Biarlah Nasionalisme Keindonesiaan Puh* pada www.mediaindo.co.id tertanggal 28 Oktober 2004.

¹¹ <http://www.xenohistorian.faithweb.com/index.html>

¹² Bambang Purwanto membahas permasalahan ini dalam satu bab penuh untuk mencoba meyakinkan bahwa sumber lisan tidak lebih rendah dari pada sumber tertulis. Lihat Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesia?!*. Yogyakarta: Ombak, 2006. Bagian 2.

¹³ Sartono Kartodirdjo, "Sejak Indische sampai Indonesia". Jakarta: *Kompas*, 2005, hlm.114-115.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.30.

Implementasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kompetensi: Suatu Analisis Deskriptif

Darsiti

3.1 Pendahuluan

Bangsa Indonesia saat ini banyak menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain era globalisasi dan reformasi dengan arus teknologi yang sangat tinggi. Keadaan demikian, menurut Sudjadi (*Kedaulatan Rakyat*, 25 Oktober 2001) kondisi tersebut menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan Indonesia mampu berkompetisi baik dalam forum nasional, regional maupun Internasional (Djohar MS,1999: 10 dan Zamroni, 2001: 33).

Menurut Djoyonegoro (Suyanto, 2001: 144) manusia berkualitas adalah manusia yang (1) memiliki keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan iptek, (2) mampu bekerja secara profesional dengan berorientasi mutu dan keunggulan, dan (3) dapat menghasilkan karya-karya unggul yang mampu bersaing secara global sebagai hasil dari keahlian dan profesionalitasnya. Manusia berkualitas hanya dapat dihasilkan melalui proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan memiliki peranan penting dan sekaligus merupakan sarana paling efektif dalam pembentukan manusia berkualitas.

Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa hasil pendidikan belum menunjukkan perubahan yang berarti atau berkualitas rendah (Suyanto, 2000: 4).

Ketimpangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan mengindikasikan bahwa hasil pendidikan belum menggembirakan alias gagal menghasilkan manusia-manusia berkualitas. Pendidikan yang berkualitas rendah akan menghasilkan manusia-manusia